



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS KESEHATAN KOTA PADAMNG PANJANG TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2020 .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2020 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. LKjIP Dinas Kesehatan Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian LKjIP Ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang

Padang Panjang, Januari 2021

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Padang Panjang



Drs.Nuryanuwar,Apt.MM.M.Kes

NIP.196201231991011 00

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Kesehatan merupakan pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan , dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota .Tugas pokok Dinas kesehatan adalah penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan peemrintah daerah di bidang kesehatn .Struktur Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang berdasarakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja

Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, maka ditetapkan 2 tujuan yaitu : Peningkatan Pelayanan Berbasis Masyarakat dan Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Dasar. Kegiatan yang di lakukan adalah perencanaan, perumusan kegiatan teknis penyelenggaraan program pembangunan di bidang kesehatan, program promosi kesehatan dan kesehatan penunjang, program pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, gizi dan institusi serta kesejahteraan keluarga. kebijakan teknis program pencegahan dan pengamatan penyakit menular dan penyehatan lingkungan pemukiman. Kegiatan penyelenggaraan koordinasi baik lintas program, lintas sektoral dan sinkronisasi pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan OPD Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.

DAFTAR ISI

Sampul Depan	
Pengantar.....	1
Ikhtisar Eksekutif	3
Daftar Isi.....	4
Daftar Tabel	6
BAB I PENDAHULUAN	
1. Dasar Pembentukan Organisasi	8
2. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi.....	10
3. Aspek Strategis Organisasi.....	11
4. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	11
5. Struktur Organisasi.....	12
6. Sumber Daya Manusia (SDM).....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020	
A. Visi-Kepala Daerah	25
B. Misi Kepala Daerah.....	25
C. Tujuan.....	26
D. Sasaran SKPD.....	26
E. Indikator Kinerja.....	26
F. Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2020.....	27
G. Rencana Strategis.....	28
H. Indikator Kinerja Utama.....	32
I. Kebijakan.....	33
J. Program dan Kegiatan.....	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2020.....	41
B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020.....	45
C. Realisasi Anggaran.....	71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....86
B. Saran.....86

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel.1.1	Komposisi Pegawai Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2020.....	14
Tabel.1.2	Tabel Data Ketenagaan Kesehatan Dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2020.....	15
Tabel.2.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis dan arah kebijakan Kepala Daerah Kota Padang Panjang.....	17
Tabel.2.2	Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2020.....	22
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2020	23
Tabel 2.4	Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan SKPD Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2020.....	25
Tabel 2.5	Target Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2020.....	27
Tabel.2.6	Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Padang Panjang tahun 2020.....	30
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	37
Tabel.3.2	Jumlah Anggaran Belanja Langsung Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang tahun 2020.....	38
Tabel 3.3	Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2020.....	39
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2020	41
Tabel 3.5	Capaian Indikator FIS PK Tahun 2020.....	46
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Indikator Persentase Stunting Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dengan Dinkes Prov.Sumbar dan Nasional.....	47
Tabel 3.8	Capaian Indikator Angka Kematian Ibu.....	50

Tabel 3.9	Capaian Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang,Provinsi Sumbar dan Nasional	51
Tabel 3.10	Capaian Indikator Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2020.....	53
Tabel 3.11	Capaian Indikator Universal Healt Coverage (UHC) Tahun 2020	57
Tabel 3.12	Kepesertaan Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2020..	59
Tabel 3.13	Program dan Capaian Program Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2020.....	61
Tabel 3.14	Realisasi Anggaran per Sasaran dan Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2019.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Kesehatan sebagai instansi pemerintah yang menjalankan kewenangan otonomi daerah di bidang kesehatan berkewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja.

Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang merupakan salah satu OPD yang mengemban dan melaksanakan tugas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2023 sesuai dengan bidang tugasnya yang tercantum dalam Tugas pokok dan fungsi, serta Organisasi dan Tata Laksana Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang pada Perda Nomor 33 Tahun 2016

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Berdasarkan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 bahwa Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban serta norma-norma agama. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan Pemerintah bertanggung jawab terhadap :

1. Merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat
2. Ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
3. Ketersediaan sumberdaya dibidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yg setinggi-tingginya.
4. merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yg setinggi-tingginya
5. Ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
6. Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan
7. Ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau.
8. Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan

Pembangunan Kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005-2025 pada tahap ke 3 Tahun 2013-2018, kondisi pembangunan kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya

tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak. Pemerintah Kota Padang Panjang telah menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang yang selanjutnya untuk Dinas Kesehatan diatur tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang melalui berdasarkan Peraturan Walikota Kota Padang Panjang Nomor 33 Tahun 2016.

B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang merupakan unsur berdasarkan Peraturan Walikota Kota Padang Panjang Nomor 33 Tahun 2016 pelaksana Bidang Kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

2. Tugas Pokok

Kedudukan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang merupakan unsur pelaksana Pemerintah mempunyai tugas pokok yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah dan tugas perbantuan dibidang kesehatan.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan, perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan program pembangunan di bidang kesehatan di Kota Padang Panjang.
- b. Perencanaan, perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan program Kesehatan dan Kesehatan Penunjang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
- c. Perencanaan, perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.
- d. Perencanaan, perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Program Jaminan Pelaksanaan Kesehatan Masyarakat Kota Padang Panjang.

- e. Perencanaan, perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengamatan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan.
- f. Pemberian perizinan, pengawasan institusi kesehatan, jasa, industri rumah tangga dan usaha di bidang kesehatan.
- g. Penyelenggaraan urusan Ketatausahaan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.

C. Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis adalah aspek yang mendukung dan merupakan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju perwujudan Visi Misi Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.

D. Permasalahan Utama (strategic issued)

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah: Isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi Kesehatan. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah (RPJP dan RPJMD)

Memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini, maka isu strategis yang masih dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dalam mencapai Target Indikator Utama (IKU) adalah :

1. Masih rendahnya cakupan Indeks Keluarga Sehat
2. Masih tingginya angka Stunting pada Anak Balita
3. Masih tingginya Angka Kematian Ibu
4. Masih tingginya Angka Kematian Bayi
5. Belum terwujudnya capaian *Universal Health Coverage* (UHC)

E. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang terdiri dari :

1. Kepala Dinas Kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang

Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan.

2. Sekretaris Dinas Kesehatan

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi , pelaksanaan dan pemberian pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan meliputi urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, perencanaan, evaluasi dan Pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas di maksud sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian
- b. Pengelolaan program administrasi keuangan
- c. Pengelolaan program administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- d. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tatalaksana serta kehumasan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari sub bagian yang bertanggung jawab kepada sekretaris Dinas Kesehatan:

- a. Kepala sub bagian Umum dan Kepegawaian.

Mempunyai tugas sebagai menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggan, peralatan dan perlengkapan kantor, menyelenggarakan kepustakaan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana serta kehumasan.

b. Kepala sub bagian Keuangan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, Akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, melakukan perencanaan dan koordinasi penyusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program rencana pembangunan Dinas, Evaluasi program, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisir data dari masing-masing seksi, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan.

3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit.

Mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan sebagian tugas dinas kesehatan, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, Gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan kesehatan jiwa.

Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kesehatan gizi, keluarga dan masyarakat.
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pencegahan dan pengendalian penyakit.
- c. Menyusun kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kesehatan jiwa dan pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang kesehatan masyarakat ,pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :

a. Kepala Seksi kesehatan keluarga dan Gizi Masyarakat

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,bimbingan tekhnis dan supervisi serta pemantauan ,evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat .

b. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan ,Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan tekhnis dan supervisi serta pemantauan ,evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan , Kesehatan kerja dan olah raga.

c. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan tekhnis dan supervisi serta pemantauan ,evaluasi dan pelaporan di bidang survailens, Immunisasi,pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan jiwa.

4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan , Promosi Kesehatan Dan Sumber Daya Kesehatan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan, termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, alat kesehatan PKRT serta Sumber Daya Manusia Kesehatan. Kepala bidang Pelayanan Kesehatan, promosi dan sumber daya kesehatan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pelayanan Kesehatan dan peningkatan mutu kesehatan.

- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program promosi dan pemberdayaan masyarakat
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program program peningkatan mutu sumber daya manusia dalam kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan, promosi dan sumber daya kesehatan terdiri dari:

- a. Kasi Pelayanan Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan
Mempunyai tugas melaksanakan peningkatan mutu fanyankes di Bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan, serta pelayanan kesehatan tradisional.
- b. Kasi Promosi kesehatan, Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat dan Pengobatan Tradisional.
Mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bimbingan tekhnis dan supervisi serta pemetaan evaluasi dan pelaporan.
- c. Kasi Sumber Daya Kesehatan dan Peningkatan Mutu
Mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan tekhnis dan supervisi serta pemamfaatan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT dan sumber daya manusia kesehatan.

5. UPTD Puskesmas susunan organisasinya terdiri dari:

- a. Kepala UPTD Puskesmas :
Mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis Dinas Kesehatan dibidang Pengelolaan Puskesmas meliputi bidang pemulihan kesehatan, perawatan dan rujukan, penyelenggaraan kebijakan teknis pencegahan, pemberantasan penyakit, pangkalan kesehatan keluarga dan penyuluhan kesehatan, penyelenggaraan kebijakan teknis pelayanan khusus dan penunjang kegiatan, penyelenggaraan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana UPTD Puskesmas dan pengelolaan administrasi UPTD Puskesmas.

b. Kepala Subag Tata Usaha

Mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan urusan ketatausahaan UPTD Puskesmas dalam arti melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan ketatausahaan, urusan hukum, organisasi, tata laksana, kehumasan, evaluasi dan pelaporan serta bimbingan teknis tenaga fungsional.

c. Kelompok Jabatan Fungsional di Puskesmas

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

6. UPTD Instalasi Farmasi (IFK) susunan Organisasinya terdiri dari :

a. Kepala UPTD Instalasi Farmasi (IFK)

Mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis Dinas Kesehatan di bidang pengelolaan Instalasi Farmasi meliputi bidang perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran obat, alat-alat kesehatan dan alat perbekalan lainnya serta pencatatan dan evaluasi.

b. Kepala Subag Tata Usaha IFK

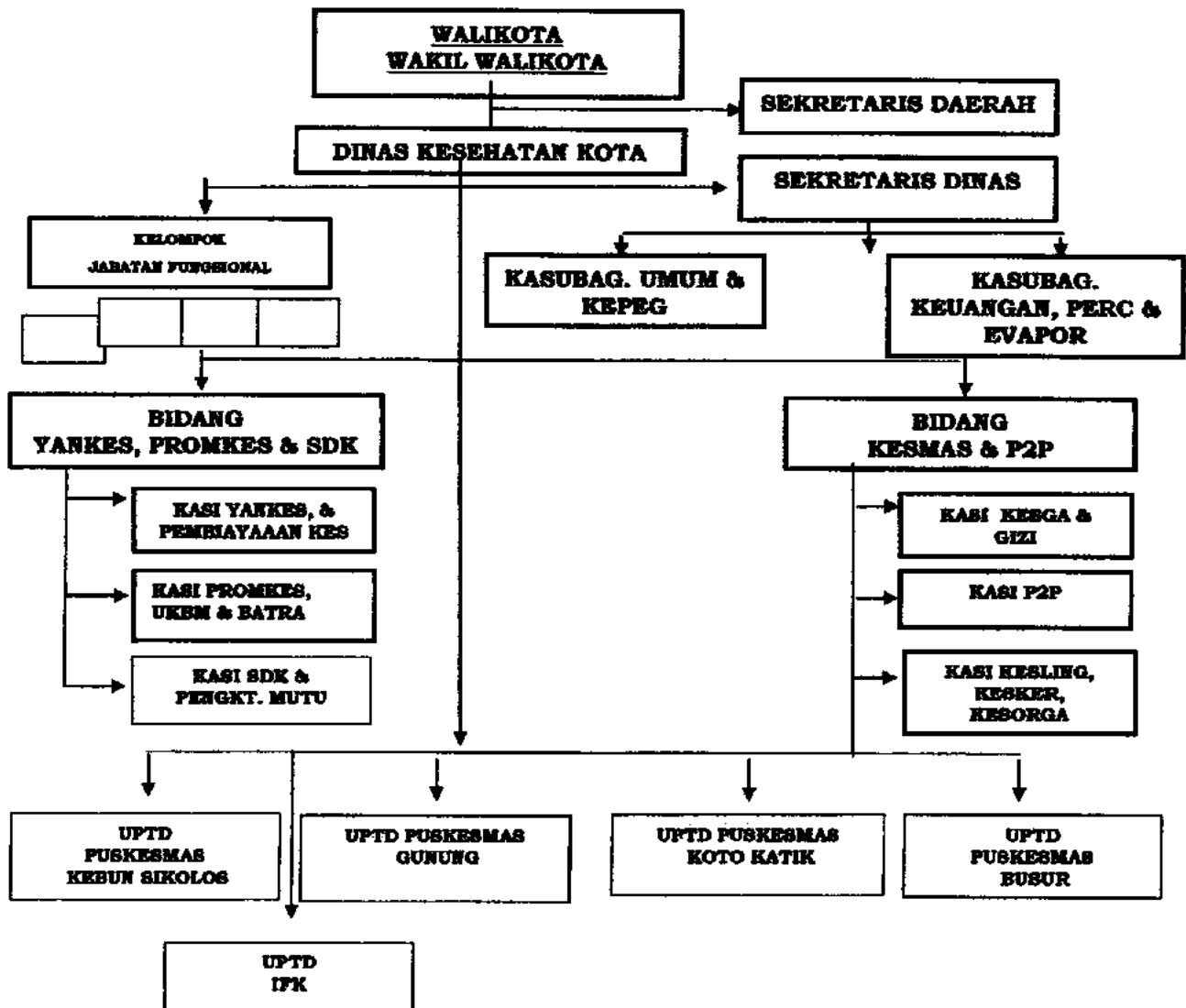
Mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan urusan ketatausahaan UPTD Instalasi Farmasi dalam arti melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan ketatausahaan, urusan hukum, organisasi, tatalaksana, kehumasan, evaluasi dan pelaporan serta bimbingan teknis tenaga fungsional.

c. Kelompok Jabatan Fungsional di IFK

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Bagan 1.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja DKK Padang Panjang



F. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut diperlukan sumber daya manusia yang handal. Adapun Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Tahun 2020 adalah sebanyak 189 orang dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1
Komposisi Pegawai Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang
Tahun 2020

NO	URAIAN	JUMLAH	JUMLAH TOTAL
1	Struktural, terdiri dari		
	Eselon II	1	1
	Eselon III	3	3
	Eselon IV	18	18
2	Fungsional Umum, Terdiri dari:		
	Golongan I	1	1
	Golongan II	36	36
	Golongan III	172	172
	Golongan IV	24	24

Sumber: Sub Bag Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2020

Tabel 2
Data Ketenagaan Kesehatan Di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2020

DATA KETENAGAAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG

DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG Keadaan Januari 2021

NO	JENIS TENAGA	DINAS KESEHATAN	PUSK. GUNUNG	PUSK KOTO KATIK	PUSK.BUKIT SURUNGAN	PUSK.KEBUN SIKOLOS	INSTALASI FARMASI	JML
1	Dokter Umum	1	2	2	2	1	0	8
2	Dokter Gigi	0	1	1	1	1	0	4
3	Perawat Ners (s-1)	6	1	0	1	1	0	9
4	Perawat (S-1)	0	0	0	1	0	0	1
5	Perawat (D-3)	1	6	2	10	7	0	26
6	Perawat (SPK)	3	1	3	2	1	0	10
7	Perawat Gigi (D-3)	0	1	1	1	2	0	5
8	Perawat Gigi (SPRG)	0	1	1	1	1	0	4
9	Bidan (D-4)	1	2	1	3	7	0	14
10	Bidan (D-3)	1	10	10	6	5	0	32
11	Bidan (D-1)	0	0	0	0	0	0	0
12	Apoteker (S-1)	1	1	1	1	1	3	8
13	Farmasi (D-3)	0	1	2	1	1	1	6
14	Asisten Apoteker (SMF)	1	1	0	0	1	0	3
15	SKM (S-1)	9	5	3	3	2	1	23
16	Kesmas (S-2)	3	0	0	1	1	0	5
17	Kesling (S-2)	1	0	0	0	0	0	1
18	Kesling (D-3)	0	0	1	0	1	0	2
19	Gizi (D-3)	0	0	1	1	1	0	3
20	Rekam Medis (D-3)	0	2	2	3	1	0	8
21	Analisis Kesehatan (D-4)	0	2	0	0	1	0	3
22	Analisis Kesehatan (D-3)	1	0	2	2	1	0	6
23	Analisis Kesehatan (SMAK)	0	0	0	0	0	0	0
24	Teknik Elektromedik (S-1)	0	0	0	0	0	0	0
25	Teknik Elektromedik (D-3)	0	0	0	0	0	0	0
26	Kimia Analisis (D-3)	1	0	0	0	0	0	1
27	Umum (S-1 Akuntan)	1	0	0	0	0	0	1
28	Umum (D-3 Akuntan)	0	0	0	0	0	0	0
29	Umum (SLTA)	5	0	0	0	0	0	5
30	Sanitarian	0	0	0	1	0	0	1
31	Manajemen (S-2)	0	0	0	0	1	0	1
32	Sosial (S-1)	1	0	0	0	0	0	1
33	Spesialis keperawatan anak(S-2)	0	0	1	0	0	0	1
	Jumlah	37	37	34	41	38	5	192

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara review atas laporan kinerja instansi

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya pemerintah.

Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 - 2023.

Berikut Penjelasan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan :

Tabel 3
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis Dan Arah Kebijakan
Kepala Daerah Kota Padang Panjang

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Vision: <i>Kepercayaan publik yang tinggi yang secara signifikan berkontribusi</i>	2 Menguatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan yang berbasis keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan	3 Meningkatkan kualitas dan daya saing yang selaras, setara, dan berkeadilan	4 Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat	5 Meningkatkan Upaya Kesehatan Masyarakat	5 Meningkatkan Upaya Kesehatan masyarakat melalui peran dan peran masyarakat dalam peningkatan kesehatan
				Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan	
				Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan	
				Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan	
				Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan	

A. Visi

Visi Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang sebagai salah satu dari penyelenggara pembangunan kesehatan di daerah, mempunyai visi: *"Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat"*.

Penjabaran dari Visi tersebut adalah komitmen politik yang hendak diwujudkan dan sekaligus sebuah gambaran cita-cita untuk bergerak bersama seluruh masyarakat Kota Padang Panjang, pemerintahnya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi dalam pembangun demi kejayaan Padang Panjang.

B. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi *"Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat"* maka Misi Dinas Kesehatan Berada Pada Misi ke-2 yaitu: *"Meningkatkan Pemerataan Kualitas Daya saing SDM Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya"*.

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi.

C. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan dan kenyataan, pada kurun waktu tertentu. Dalam mewujudkan misinya, ditetapkan tujuan untuk kesehatan yaitu : *"Meningkatkan Pemerataan Kualitas Daya saing SDM yang Sehat, Berakhlak dan Unggul"*.

Kualitas kesehatan perlu menjadi perhatian semua pihak dengan mengarahkan pada mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan tagline Padang Panjang Sehat.

D. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang ditetapkan sasaran yaitu: *"Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat"*.

E. Indikator Kinerja

Guna memudahkan pengukuran dan evaluasi kinerja, tujuan strategis dijabarkan menjadi beberapa sasaran strategis yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Sasaran strategis, indikator dan target kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang untuk tahun 2020 (sebagaimana tertera pada Pengukuran Kinerja tahun 2020 dan sebagaimana pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

TABEL 4
INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2020

No	Indikator Kinerja	Target
1	Indeks Kesehatan Sehat	94,5
2	Persentase Stunting	17,1
3	Persentase Ibu Hamil Berat (AKI)	1,5
4	Persentase Ibu Hamil Berat (AKH)	1,5
5	Persentase Universal Health Coverage (UHC)	97,1

F. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020. Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan
Kota Padang Panjang
Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	0,45
2	Menurunnya Persentase Stunting Masyarakat	Persentase Stunting	17%
3	Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI)	0
4	Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka Kematian Bayi (AKB)	11
5	Meningkatnya Persentase Universal Health Coverage (UHC)	Persentase Universal Health Coverage (UHC)	97,17%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang tahun 2020 terdapat 1 Sasaran dengan 5 indikator.

G. Rencana Strategi .

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 -2023.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian

akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Disamping itu pula, Renstra Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Kesehatan, Bappenas dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018 - 2023 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dan *stakeholder*.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang hasil dapat dilihat pada table dibawah ini:

H. INDIKATOR KERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Padang Panjang juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Target Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2020

N O	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Indeks Keluarga Sehat	0,45
2	Persentase Stunting	11
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	0
4	Angka Kematian Bayi (AKB)	11
5	Persentase Universal Health Coverage (UHC)	97,17%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada semua Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 202 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang pada tahun 2020.

I. Kebijakan

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang membuat kebijakan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan layanan kesehatan dengan menitik beratkan pada upaya promotif dan preventif.
2. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan upaya promosi kesehatan.
3. Penguatan gerakan masyarakat, lembaga pemerintah dengan swasta dalam peningkatan upaya kesehatan masyarakat.
4. Peningkatan perbaikan gizi masyarakat.
5. Peningkatan Kesehatan ibu dan anak.
6. Peningkatan cakupan akses, keterjangkauan mutu pelayanan kesehatan.
7. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1000 hari kehidupan manusia.
8. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular terutama HIV dan Tuberkulosis.
9. Peningkatan pemerataan dan kualitas kesehatan lingkungan.
10. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan.
11. Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya kesehatan yang memiliki kompetensi dan terstandarisasi.
12. Peningkatan kualitas pelayanan dan rehabilitasi gangguan kesehatan kejiwaan.
13. Peningkatan efektifitas pembiayaan kesehatan.
14. Peningkatan ketidaktepatan sasaran pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

J. Program Dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung kebijakan, mendukung kinerja sasaran dan indikator kinerja dari sasaran maka di perlukan 7 (tujuh) Program dan 52 (lima puluh dua) kegiatan, sebagaimana terlihat pada Tabel dibawah:

Tabel 8
Program Dan Kegiatan Dinas Kesehatan
Padang Panjang Tahun 2020

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU
1		3	4
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 717.391.224
		2 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Rp. 513.781.616
		3 Penyediaan Makanan dan minuman	Rp. 50.050.000
		4 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp. 148.621.000
		5 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kantor	Rp. 314.064.814
		6 Penyediaan Jasa Medis	Rp. 85.616.875
		7 Pengadaan cetak dokumen dan jasa surat menyurat	Rp. 110.750.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp. 75.100.000
3	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Rp. 40.725.000
		2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kotun Sikoles	Rp. 1.835.975.010
		3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Gunung	Rp. 850.000.000
		4 Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Koto Katik	Rp. 941.428.322
		5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Bukit Surungan	Rp. 1.718.089.369
		6 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK Non Fisik)	Rp. 8.914.860.768
		7 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Rp. 65.000.000
		8 Pemetaan ibu hamil dan penjarangan ibu hamil resiko tinggi	Rp. 13.475.000
		9 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan berbasis masyarakat	Rp. 100.000.000
4	Program Perbekalan Gizi Masyarakat	1 Pemberian makanan tambahan dan vitamin	Rp. 51.375.000
		2 Penanggulangan Kurang energi Protein (KEP), Anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan Kekurangan zat gizi mikro lainnya	Rp. 32.600.000
		3 Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga sadar Gizi	Rp. 22.375.000
		4 DAK Penurunan Stunting (DAK Penugasan)	Rp. 71.824.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU
5	Program Pengembangan Lingkungan sehat	1 Forum Kota Sehat (Pengembangan Tataan Kota Sehat)	Rp. 44.000.000
		2 Sosialisasi Kebijakan lingkungan sehat dan sekolah sehat	Rp. 12.200.000
		3 Penyehatan Lingkungan dan Sampah Medis	Rp. 27.600.000
6	Program Pelayanan	1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp. 350.000.000
		2 Pemusnahan obat rusak dan kadaluarsa	Rp. 10.000.000
		3 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Rp. 38.808.750
		4 DAK Pelayanan Kefarmasian	RP. 480.999.000
		5 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Obat Kosmetik dan Obat Tradisional	RP. 12.100.000
		6 Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dan Uji Kompetensi Nakes	Rp. 39.777.325
		7 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	Rp. 243.100.000
		8 Persiapan Akreditasi Puskesmas	Rp. 100.440.000
		9 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Haji	Rp. 28.205.000
		10 Pelayanan P3K	Rp. 66.300.000
		11 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Rp.9.376.448.010
		12 Pelayanan Kesehatan dan Pendekatan Keluarga (PIS FK)	Rp. 34.289.000
		13 Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui Dokter warga	Rp. 364.139.647
		14 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Darurat dan Bencana, serta pembentukan Safety centre (PSC) J19	Rp. 978.571.000
		15 Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Rp. 46.772.800
		16 DAK Pelayanan Dasar	Rp.3.241.517.000
		17 Penunjang DAK Pelayanan Dasar	Rp. 133.260.000
		18 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Puskesmas / jaringannya	Rp. 134.246.250
		19 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Rp. 106.293.750
		20 Pemeliharaan Rutin /berkala sarana dan Prasarana Puskesmas	Rp. 96.850.000
		21 DAK Jampersal	Rp. 78.902.000
		22 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	Rp. 278.855.000

11	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1	Penyemprotan / foging sarang nyamuk	Rp. 31.150.000
		2	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Rp. 400.000.000
		3	DAK Bidang Pengendalian Penyakit (DAK Penugasan)	Rp. 492.432.500

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Renja Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

A. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2020

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja.

Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

Tabel 9
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 >	Sangat Baik	
2.	76 - 90	Tinggi	
3.	66 - 75	Sedang	
4.	51 - 65	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Dalam melaksanakan program dan kegiatan bersama masyarakat menggunakan dana dari APBD Kota Padang Panjang dan APBN (DAK), Dalam pencapaian kinerja di atas Dinas Kesehatan juga mengacu kepada penetapan kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2020 serta rencana strategi (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2018 - 2023 yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan dari OPD.

Dalam tahun 2020 dana yang teralokasi pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan yang dilaksanakan bersama masyarakat dengan menggunakan dana bersumber dari dana APBD dan DAK dengan rincian:

Tabel 10
Jumlah Anggaran Belanja Langsung
Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2020

NO	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH
1	2	3
1	Dana APBD Kota Padang Panjang	Rp. 20.817.179.762
2	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp. 13.559.390.268
	JUMLAH	Rp. 34.376.570.030

Dalam rencana kerja tahun 2020 Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang menetapkan 7 (Tujuh) program dan 52 (lima puluh dua) kegiatan yang akan dilaksanakan guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kota Padang Panjang. Target pelaksanaan pada tahun 2020 yaitu 100% baik fisik maupun keuangan, ternyata hasil pencapaian realisasi keuangannya adalah Rp.27.355,187.809,- atau sebesar 79,58% tetapi untuk realisasi fisik adalah sebesar 100.%.

Pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang beserta target dan capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan berikut ini.

Tabel 11
Pencapaian SPM Bidang Kesehatan
Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2020

No	Standar Pelayanan Minimal		Target (%)	Penanggung Jawab
	Jenis Layanan Dasar	Capaian (%)		
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	94,5	100	SEKSI KESGA GIZI
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	89	100	SEKSI KESGA GIZI
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	92,68	100	SEKSI KESGA GIZI
4	Pelayanan Kesehatan Balita	53,13	100	SEKSI KESGA GIZI
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	98,39	100	SEKSI PROMKES
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif	20,1	100	SEKSI P2P
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	52,32	100	SEKSI KESGA GIZI
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	49,6	100	SEKSI P2P
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	100	100	SEKSI P2P
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100	100	SEKSI P2P
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkolosis (TB)	100	100	SEKSI P2P
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100	100	SEKSI P2P

B. Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2020

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indicator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil kinerja pengukuran pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 12
Capaian Indikator Utama Dinas Kesehatan
Kota Padang Panjang
Tahun 2020

Indikator Kinerja		Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
1	Indeks Keluarga Sehat	0.45	0.33	73,33%
2	Persentase Stunting	17%	16,8%	101%
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	0	4	0%
4	Angka Kematian Bayi (AKB)	11	5	154%
5	Persentase Universal Health Coverage (UHC)	97,17 %	95.59%	98.37%

Berdasarkan tabel diatas Capaian Indikator Utama Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks Keluarga Sehat.

Target pada indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS) pada tahun 2020 adalah 0,45 dengan realisasi sebesar 0,33 dengan capaian kinerja sebesar 73,33%. Walaupun IKS Kota Padang Panjang belum mencapai target, namun pencapaian target IKS kota Padang Panjang ini merupakan peringkat terbaik pada tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Peringkat 7 Nasional.

Berikut ini adalah 12 Indikator Indeks Keluarga Sehat yang terdiri dari:

1) Keluarga Mengikuti Program Keluarga Berencana (KB)

Indikator ini dianggap sudah terpenuhi jika sebuah keluarga mendapatkan pelayanan KB di tingkat kelurahan, capaian pada indikator keluarga yang mengikuti program keluarga berencana dari total Pasangan Usia Subur baru sebanyak 56,31% yang mengikuti program KB.

2) Ibu Melakukan Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Indikator ini dianggap tercapai apabila dalam sebuah keluarga sang ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan resmi seperti puskesmas atau rumah dengan tenaga kesehatan. Capaian indikator pada ibu melahirkan di fasilitas kesehatan dari total ibu bersalin yang melakukan persalinan di Fasilitas Kesehatan adalah 99,23 %.

3) Bayi 0-11 bulan Memperoleh Imunisasi Dasar Lengkap

Jika dalam sebuah keluarga terdapat anak berusia antara 1 sampai dengan 2 tahun, maka ia seharusnya sudah memperoleh imunisasi dasar lengkap. Imunisasi dasar ini meliputi vaksin Hepatitis B, BCG, DPT, Polio, dan Campak. Faktor pendukung dari indikator ini adalah adanya pelayanan imunisasi dasar di puskesmas maupun fasilitas kesehatan lain yang terdekat dengan keluarga. Kemudian ibu dan ayah seharusnya juga mendapatkan pengenalan imunisasi dasar dan mengetahui pentingnya imunisasi dasar yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Keluarga juga harusnya mendapatkan imbauan untuk melakukan imunisasi dasar kepada anak oleh para pemuka agama dan kader PKK. Yang terakhir, keluarga seharusnya memperoleh informasi secara nasional baik melalui televisi atau media lainnya mengenai imunisasi. capaian pada indikator ini dari Total Bayi 0-11 bulan yang memperoleh immunisasi lengkap sebesar 78,89 %.

4) Pemberian ASI Eksklusif bayi 0-6 bulan

Masih berhubungan dengan bayi, indikator keluarga sehat yang keempat berkaitan dengan ASI. Bayi dalam sebuah keluarga seharusnya mendapatkan ASI eksklusif selama minimal 6 bulan. Jika

ada ibu yang kesulitan memberikan ASI, seharusnya bisa dengan mudah mendapatkan pelayanan konsultasi di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Ibu harus juga mendapatkan promosi berkenaan pentingnya ASI eksklusif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terkait. Capaian pada indikator ini adalah dari total ibu yang menyusui yang memberikan Asi Eklusif sebanyak 74,69%.

5) Pemantauan pertumbuhan Balita (2-59) bulan

Indikator keluarga sehat yang berikutnya masih berhubungan dengan bayi dan balita. Mereka seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan setiap bulannya, minimal dengan menimbang berat badan. Pelayanan kesehatan ini minimal dilakukan satu kali setiap bulan dan dibimbing secara langsung oleh Puskesmas namun pelaksanaannya bisa dilakukan oleh ibu-ibu di lingkungan tersebut. Untuk anak pemantauan pertumbuhan di sekolah masing-masing. Capaian pada indikator ini adalah dari Total Balita yang melakukan pemantauan pertumbuhan balita sebanyak 90,56 %.

6) Penderita TB Berobat Sesuai dengan Standar

Indikator kesehatan keenam berkaitan dengan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Dalam hal ini, jika di dalam suatu keluarga terdapat seseorang yang menderita penyakit batuk lebih dari 2 minggu atau memang sudah diketahui mengalami tuberkolosis, maka wajib berobat sesuai dengan ketentuan. Faktor pendukung dari indikator ini adalah adanya pelayanan kesehatan untuk penderita tuberkolosi dan penyakit paru di puskesmas atau rumah sakit. Dalam sebuah keluarga, juga harus ada pengawas menelan obat atau PMO yang berfungsi mengingatkan penderita tuberkolosis dan paru agak selalu minum obat secara teratur dengan capaian pada tahun 2019

adalah dari Jumlah Penderita TB Berobat Sesuai dengan Standar 47,92%.

7) Penderita Hipertensi Berobat Secara Teratur

Apabila di dalam sebuah keluarga juga terdapat anggota yang menderita tekanan darah tinggi, maka harus berobat dengan rutin karena penyakit ini bisa menjadi komplikasi dan memicu penyakit mematikan lainnya. Dengan capaian pada tahun 2019 adalah dari Total Penderita Hipertensi yang Berobat Secara Teratur Sebanyak 36,73%.

8) Penderita Gangguan Jiwa Berat (Schizophrenia) berobat dengan benar.

Apabila ada anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, maka harus diajak berobat dan tidak ditelantarkan. Sebab penderita gangguan jiwa justru perlu diberi dukungan sehingga bisa segera sembuh. Dengan capaian dari Total Penderita Gangguan Jiwa Berat (Schizophrenia) yang berobat dengan benar 57,32%.

9) Tidak Ada anggota keluarga yang Merokok

Indikator kesehatan keluarga yang kedelapan berkaitan dengan perilaku sehat. Dalam hal ini, seluruh anggota keluarga diharapkan bebas rokok alias tidak merokok sama sekali. Keluarga harus mendapatkan pelayanan untuk berhenti merokok di puskesmas atau faskes lain yang terdekat. Dengan capaian pada tahun 2020 adalah dari jumlah keluarga yang di data yang Tidak Ada anggota keluarga yang Merokok 43,09%.

10) **Sekeluarga sudah menjadi anggota JKN**

Seluruh anggota keluarga sudah terdaftar menjadi anggota BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan memiliki kartu kesehatan, maka dianggap lolos indikator ini. Capaian pada indikator adalah dari 19.256 KK sekeluarga sudah menjadi anggota JKN sebanyak 90,35%.

11) **Mempunyai sarana Air Bersih**

Keluarga harusnya memiliki akses air bersih baik dalam bentuk PDAM maupun sumur. Secara luas, keluarga juga harus bisa mendapatkan air bersih di tempat-tempat umum seperti sekolah atau perkantoran. Capain pada indicator ini adalah dari Total KK yg disurvei yang Mempunyai sarana Air Bersih 97,84%.

12) **Menggunakan Akses Jamban Sehat**

Keluarga sudah memiliki akses terhadap jamban sehat, yakni jamban berbentuk leher angsa dan bukan hanya sekadar lubang di tanah dengan capaian kinerja adalah dari Total KK yg disurvei KK yang Menggunakan Akses Jamban Sehat 88,02 % pada tahun 2020.

Berikut ini adalah tabel pencapaian Indikator Keluarga Sehat tahun 2020:

Tabel 12
Capaian Indikator PIS – PK Tahun 2020

NO	Indikator	Capaian (%)	Intervensi Masing-Masing Indikator	IKSS
1.	Keluarga mengikuti Program KB	56,31%		0,33
2.	Persalinan Ibu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	99,23%		
3.	Bayi Mendapat imunisasi dasar lengkap	79,89%		
4.	Bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	74,69%		
5.	Perawatan Bayi dan Balita dipantau setiap bulan	90,56%		
6.	Penderita TB Berobat sesuai standar	47,92%		
7.	Penderita Hipertensi berobat sesuai teratur	36,73%		
8.	Gangguan Jiwa mendapat pengobatan dan tidak terlupakan	57,37%		
9.	Anggota keluarga tidak ikut makan merokok	44,09%		
10.	Sekeluarga menjadi anggota IKM	90,35%		
11.	Keluarga mempunyai sarana air bersih	97,84%		
12.	Keluarga mempunyai jamban keluarga	88,02%		

2. Persentase Stunting

Berikut adalah tabel Pencapaian Indikator Stunting Tahun 2020.

Tabel 13
Capaian Indikator Persentase Stunting Tahun 2020

Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
Persentase Stunting	17 %	16,8 %	101%

Pada tahun 2020 target indikator Persentase Stunting pada tahun 2020 adalah 17 % dengan realisasi pencapaian sebesar 16,8% dan capaian kinerja sebesar 101 %.

Indikator Persentase Stunting dengan cara pengukuran:

$$\frac{\text{Tinggi badan/umur (pendek + sangat pendek)} \times 100\%}{\text{Jumlah Balita Timbang}}$$

Jumlah Balita Timbang

Dari cara pengukuran diatas didapat dengan jumlah 573 balita pendek di tambah balita sangat pendek dari jumlah balita yang di timbang sebanyak 3.416 Balita.

Tabel 14
Perbandingan Capaian Indikator Persentase Stunting Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dengan Dinkes Prov.Sumbar dan Nasional Tahun 2020

Indikator Sasaran	Realisasi DKK 2020	Target Dinkes Prov.Sumbar 2020	Target Nasional 2020
Persentase Stunting	16,8%	26,8 %	24,1 %

Berdasarkan tabel 14 dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator stunting di Kota Padang Panjang sudah mencapai target dan diatas dari target provinsi dan target nasional.

3. Angka Kematian Ibu (AKI)

Keberhasilan upaya Kesehatan Ibu, di antaranya dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI). AKI adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dan lain lain di setiap 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu mencerminkan

resiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan sampai dengan paska persalinan yang dipengaruhi oleh status gizi, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri.

Kematian ibu biasanya terjadi karena kurangnya akses ke pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, terutama pelayanan kegawatdaruratan tepat waktu yang dilatarbelakangi oleh terlambat mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas pelayanan kesehatan, serta terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu penyebab kematian ibu juga tidak terlepas dari kondisi ibu itu sendiri yang merupakan salah satu dari kriteria 4 “terlalu” yaitu terlalu tua pada saat hamil/melahirkan (>35 th), terlalu muda pada saat melahirkan (<20 th), terlalu banyak anak, dan terlalu rapat jarak kelahiran/ paritas. Berikut tabel capaian kinerja Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2020:

Tabel 15
Capaian Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2020

INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN KINERJA
Angka Kematian Ibu	0	4	0%

Berdasarkan tabel 15, target AKI untuk tahun 2020 adalah 0 kematian, Pada tahun 2020 terdapat 4 kematian Ibu. Jumlah Kematian Ibu sebanyak 4 orang ini diakibat oleh penyakit penderita yaitu: Penyakit Penyakit lupus , Penyakit Hipertensi, Penyakit Paru, Depresi. Angka Kematian Ibu di Kota Padang Panjang sangat sulit dihitung, karena

penghitungan Angka Kematian Ibu dihitung setiap 100.000 kelahiran hidup, sementara pada tahun 2020 Jumlah Kelahiran hidup adalah sebesar 994.

Tabel 16
Perbandingan Capaian Indikator Angka Kematian Ibu (AKI)
Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, Provinsi Sumbar
dan Nasional Tahun 2020

Indikator Sasaran	Target Tahun 2020		
	Kota Padang Panjang	Provinsi Sumatera Barat	Nasional
Angka Kematian Ibu	0	94	230

Target Nasional Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 230 per 100.000 lahir hidup, dan target Provinsi Sumatera Barat sebesar 94 per 100.000.

Berdasarkan tabel 16 diatas dapat disimpulkan bahwa AKI pada Kota Padang Panjang Tahun 2020 masih di bawah Angka Kematian Ibu (AKI) tingkat Provinsi dan Target Nasional

4. Angka Kematian Bayi (AKB)

Berikut adalah tabel Capaian Indikator Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2020.

Tabel 17
Capaian Indikator Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2020

INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN KINERJA
Angka Kematian Bayi	7	11	5	154%

Berdasarkan tabel 17, Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2020 ditargetkan 11 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2020 jumlah Kematian Bayi adalah sebanyak 5 kematian atau sebesar 154%. Penyebab kematian bayi

terbanyak di Kota Padang Panjang selama tahun 2020 adalah Asfiksia dan kelainan kongenital.

Untuk mengukur Angka Kematian Bayi di Kota Padang Panjang sulit dihitung, karena penghitungan Angka Kematian bayi dihitung setiap 1000 kelahiran hidup, sementara pada tahun 2020 Jumlah Kelahiran hidup adalah sebesar 994 kelahiran, namun pencapaian AKB Kota Padang Panjang tahun 2020 sudah dibawah target Provinsi Sumatera Barat sebesar 24 per 1.000 lahir hidup dan target nasional yaitu sebesar 24 per 1.000 lahir hidup. Jika dibandingkan dengan pencapaian AKB tahun 2019, dimana AKB adalah sebesar 7 kematian. Dapat disimpulkan bahwa pencapaian AKB tahun 2020 lebih baik dari tahun 2019.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dalam upaya menurunkan AKB antara lain :

- a. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam penatalaksanaan asfiksia, penerapan standar rujukan asfiksia, peningkatan pengetahuan ibu hamil tentang kesehatan kehamilan dan janin melalui pelaksanaan kelas ibu hamil di masing - masing kelurahan, pemberian buku pintar bagi calon pengantin bekerjasama dengan kementerian agama.
- b. Penempatan bidan di kelurahan sebagai tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang berkesinambungan dan paripurna, berfokus pada aspek pencegahan melalui pendidikan kesehatan dan konseling, promosi kesehatan, pertolongan persalinan normal dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat serta melakukan deteksi dini untuk mengetahui resiko tinggi ibu hamil serta melakukan rujukan pada kasus-kasus gawat darurat.
- c. Peningkatan kapasitas petugas dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan perinatal.

- d. Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) kasus kematian bayi dengan narasumber Dokter Spesialis Obgyn (DSOG) dan Dokter Spesialis Anak (DSA) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir.
- e. Pelaksanaan rujukan terencana pada kasus resiko tinggi
- f. Dukungan lintas sektor untuk pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan bayi melalui kerjasama lintas sektor khususnya PKK dan PNPM (generasi sehat dan cerdas).
- g. Peningkatan perubahan pengetahuan dan perilaku dalam menangani kasus bayi resiko tinggi.
- h. Penguatan Pemda Kota Padang Panjang dalam tata kelola desentralisasi program kesehatan (regulasi, pembiayaan dll) dan kerjasama lintas program dan lintas sector.
- i. Pemenuhan sarana dan prasarana Pelayanan di Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya.
- j. Supervisi ke tempat fasilitas pelayanan kesehatan.

5. Persentase Universal Health Coverage (UHC)

Seiring dengan dilaksanakannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 Januari 2014 semua program jaminan kesehatan yang telah dilaksanakan pemerintah tersebut (Askes PNS, JPK Jamsostek, TNI, POLRI dan Jamkesmas) diintegrasikan ke dalam satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), demikian pula dengan Program JKMPP dan JKSS. Pemerintah bertanggungjawab untuk membayarkan iuran JKN bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya dalam bentuk pengembangan sistem pembiayaan kesehatan sebagaimana dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa

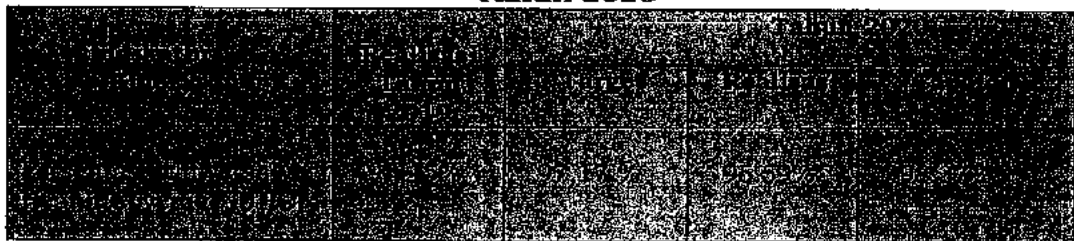
pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial yang didalamnya termaktub dalam sistem jaminan kesehatan.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang masih tetap mengembangkan dan mengalokasikan dana untuk kegiatan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah, dengan 2 (dua) sasaran yang berbeda :

- a. Mengintegrasikan masyarakat miskin yang belum masuk dalam basis data pusat/ Basis Data Terpadu (BDT).
- b. Memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat kota Padang Panjang, bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan

Berikut adalah tabel Capaian Indikator Persentase Universal Health Coverage (UHC) tahun 2020.

Tabel 18
Capaian Indikator Universal Health Coverage (UHC)
Tahun 2020



Pada Tabel 18 dapat dijelaskan bahwa Target UHC tahun 2020 adalah 97,17%. Realisasi tahun 2020 adalah sebesar 95,59% dengan capaian kinerja 98,37% . Capaian tahun 2020 ini lebih tinggi dibanding tahun 2019 (95,15%). Target UHC untuk tingkat Nasional adalah sebesar 95%. Dapat disimpulkan capaian UHC Kota Padang panjang sudah melebihi target nasional. Sehingga dapat dikatakan Kota Padang panjang sudah UHC. Pencapaian UHC ini sudah di peroleh selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan mendapatkan Penghargaan dar BPJS pada tahun 2020.

Berikut ini dapat juga disampaikan bahwa berdasarkan data-data per 31 Desember 2020 tercatat Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 19
Kepesertaan Kota Padang Panjang
Per 31 Desember 2020
(Sumber Data Aplikasi Bpjs Kesehatan)

Jenis Kepesertaan	Padang Panjang
1. Penerima Bantuan Iuran	15.523
a. PNS	9.772
b. TNI/POLRI	1.436
c. Pejabat Negara	5
d. PPNPN	764
e. DPRD	61
f. Pegawai Swasta	
1) Eks JPK Jamsostek	
2) Perusahaan BUMN	
3) Lainnya	2.080
g. Pekerja Penerima Upah selain a) -e)	
h. Warga Asing bekerja ≥ 6 bulan	
2. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)	
a. Pekerja Mandiri (PM)	5.773
b. PBPU selain PM	1
Bukan Pekerja (BP)	
a. Investor	4
b. Pemberi Kerja	1
c. Penerima Pensiunan (PP)	
1) PP PNS	1.463
2) PP TNI /POLRI	250
3) PP PN	0
4) PP selain 1) -3)	

5) Janda/ Duda/ Anak Yatim Piatu dari PP 1)	
d. Veteran	34
e. Perintis Kemerdekaan (PK)	1
JKSS Padang Panjang	7.962
JKMPP	10.664
Total	55.794
Jumlah Penduduk Semester I Th 2020	58.367
% Persentase dari Jumlah Penduduk	95.59%

B. Realisasi Anggaran

Berikut ini adalah Realisasi Anggaran Tahun 2020 dalam mewujudkan kinerja Dinas Kesehatan Kota berdasarkan Perjanjian Kinerja.

Tabel 20
Realisasi Anggaran Per Sasaran dan Pencapaian Kinerja
Dinas Kesehatan Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tercapainya Masyarakat Sehat	Angka Harapan Hidup	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Rp. 40.725.000	Rp. 33.964.150	83,40%
				2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kebun Sikolops	Rp. 1.835.975.010	Rp. 1.055.227.348	57,48%
				3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Gunung	Rp. 850.000.000	Rp. 633.163.714	74,49%
			Program Perbaikan Ciri Masyarakat	4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Koto Katik	Rp. 941.428.322	Rp. 587.213.008	62,37%
				5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Bukit Surungan	Rp. 1.718.089.369	Rp. 711.911.935	41,44%
			6. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK Non Fisik)	Rp. 8.914.860.768	Rp. 7.710.814.035	86,49%	
			7. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Rp. 65.000.000	Rp. 63.414.000	97,56%	

8.	Pemetaan Ibu Hamil dan Perjaringan Ibu Hamil Resiko Tinggi	Rp. 13475000	Rp. 9.567.500	71.00%
9.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Berbasis Masyarakat	Rp. 100.000.000	Rp. 96.074.000	96.07%
1.	Pemberian Makanan dan Vitamin	Rp. 51.375.000	Rp. 41.488.425	80.76%
2.	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAK), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Rp. 32.600.000	Rp. 25.603.000	78.53%
3.	Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	Rp. 22.375.000	Rp. 18.021.800	80.54%
4.	DAK Penurunan Stunting (DAK Penugasan)	Rp. 71.824.000	Rp. 71.819.080	99.99%
1.	Forum Kota Sehat (Pengembangan Tatanan Kota Sehat)	Rp. 44.000.000	Rp. 43.387.800	98.61%
2.	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat dan Sekolah Sehat	Rp. 12.200.000	Rp. 11.965.700	98.08%

3.	Penyehatan Lingkungan dan Sampah Medis	Rp. 27,600,000	Rp. 25,720,000	93.19%
1.	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp. 350,000,000	Rp. 347,990,437	99.43%
2.	Pemurnahan Obat Rusak dan Kadaluwarsa	Rp. 10,000,000	Rp. 10,000,000	100.00%
3.	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Rp. 36,808,750	Rp. 34,405,200	88.65%
4.	DAK Pelayanan Ketarmasian	Rp. 480,999,000	Rp. 479,009,950	99.59%
5.	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Obat Kosmetik dan Obat Tradisional	Rp. 12,100,000	Rp. 11,264,775	93.10%
6.	Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dan Uji Kompetensi Nakes	Rp. 39,777,325	Rp. 37,612,525	94.56%
7.	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	Rp. 243,100,000	Rp. 200,575,000	82.51%
8.	Persiapan Akreditasi Puskesmas	Rp. 100,440,000	Rp. 79,745,125	79.40%
9.	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Haji	Rp. 28,205,000	Rp. 22,698,650	80.48%

10.	Pelayanan P3K	Rp. 66.300.000	Rp. 28.950.900	43,67%
11.	Peningkatan Pelayanan dan Peninggulangan Masalah Kesehatan	Rp. 5.376.448.010	Rp. 4.560.876.600	84,90%
12.	Pelayanan Kesehatan dan Pendekatan Keluarga (PIS- PK)	Rp. 34.289.000	Rp. 20.570.950	59,99%
13.	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Melalui Dokter Warga	Rp. 364.139.647	Rp. 329.490.098	90,48%
14.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Darurat (P3K) dan Bencana serta Pembentukan Public Service Centre (PSC)	Rp. 978.571.000	Rp. 838.219.694	85,66%
15.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Rp. 46.772.800	Rp. 45.889.000	98,11%
16.	DAK Pelayanan Dasar	Rp. 3.241.517.000	Rp. 2.139.024.831	65,99%
17.	Penunjang DAK Pelayanan Dasar	Rp. 133.260.000	Rp. 110.952.400	83,26%
18.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Puskesmas	Rp. 134.246.250	Rp. 124.084.100	92,43%
19.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Rp. 106.293.750	Rp. 97.111.600	91,36%
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				

20	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas	Rp. 96.850.000	Rp. 42.436.000	43,82%
21	DAK Jaminan Peralinan (Jampersal)	Rp. 79.900.000	Rp. 0	0%
22	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Field)	Rp. 278.855.000	Rp. 126.537.425	45,38%
1.	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	Rp. 31.150.000	Rp. 18.217.250	58,48%
2.	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp. 400.000.000	Rp. 399.997.000	100%
3.	DAK Bidang Pengendalian Penyakit (DAK Penguasaan)	Rp. 492.432.500	Rp. 479.473.750	97,37%
4.	Sosialisasi Imunisasi Balita, Anak Sekolah, Penyakit Tidak Menular dan Penyakit Menular	Rp. 41.035.000	Rp. 34.146.075	83,21%
5.	Penjaringan Penyakit Tidak Menular dan Surveillance	Rp. 180.525.000	Rp. 142.429.000	78,90%
JUMLAH		Rp. 34.376.570.000	Rp. 27.355.187.809	79,58%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Anggaran pada tahun 2020 sebanyak Rp. 34.376.570.030 dan realisasi sebesar Rp. 27.355.187.809 dengan persentase keuangan sebesar 79,58 %. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2020 telah berjalan dengan baik, dengan kondisi Pandemi Covid 19 kegiatan yang bersifat sosialisasi, workshop dan pertemuan lainnya tetap dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja OPD ini sangat perlu dalam pengambilan kebijakan pada kegiatan tahun berikutnya.
2. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan evaluasi kuantitatif terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2020 yang dinilai melalui Indikator Kinerja Utama.
3. Laporan ini sebagai bahan tolok ukur kinerja terhadap tercapainya Renstra Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dan tolok ukur kinerja pimpinan OPD beserta staf dalam melaksanakan tupoksi.
4. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang secara umum pada Tahun 2020 telah tercapai dengan sasaran yang direncanakan dengan pencapaian fisik sebesar 100% dengan realisasi keuangan 79,58%

B. Saran

1. Semoga Laporan Kinerja OPD ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam memberikan penilaian terhadap pelaksanaan program kegiatan Dinas kesehatan di Tahun 2020
2. Semoga program dan kegiatan yang telah dilaksanakan akan lebih meningkat lagi baik dari sisi pendanaan maupun pelaksanaan administrasi keuangannya untuk Tahun 2020
3. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bagian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2020

Padang Panjang, Januari 2020

**Kepala Dinas Kesehatan
Kota Padang Panjang**

Drs.Nuryanuwar.Apt.MM.M.Kes

NIP. 19620123199101100

